

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Uji Kualitas Instrumen dan Data**

**1. Statistik Deskriptif Demografi Responden**

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai tempat penelitian yang terdiri dari 4 Badan dan 11 Dinas yang beralamat di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 91 responden, yang terdiri dari pegawai badan atau dinas di Kabupaten Kebumen dengan peta distribusi yang terlihat dalam tabel 4.1 :

**Tabel 4.1**  
**Data Penyebaran Kuesioner**

No.	Nama Kota / Kabupaten	Kuesioner Yang Dibagikan	Kuesioner Yang Kembali
1.	Pegawai Badan atau Dinas	104	91
<b>Total Responden</b>		<b>104</b>	<b>91</b>

Sumber : Data Primer

Kuesioner yang disebar sebanyak **104**. Gambar data sampel dapat dilihat pada tabel 4.2 :

**Tabel 4.2**  
**Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang dikirim	104	100%
Kuesioner yang kembali	91	88%
Kuesioner yang tidak kembali	13	12%
Kuesioner yang dapat kembali dan diolah	91	88%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diambil kesimpulan jika dari sebanyak 104 kuesioner yang disebar yang berhasil kembali berjumlah 91 kuesioner. Sedangkan untuk kuesioner yang tidak berhasil kembali yaitu sebanyak 13 kuesioner. Kuesioner yang telah berhasil kembali sejumlah 91 Kuesioner semuanya yang layak digunakan sebagai analisis penelitian.

Karakteristik responden menampilkan identitas responden seperti jabatan, umur, jenis kelamin, pendidikan serta masa kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah dari masing-masing responden. Deskripsi karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.3 :

**Tabel 4.3**  
**Data Statistik Karakteristik Responden**

<b>Keterangan</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen</b>
Jabatan Responden	▪ Sekretaris	11	12,1
	▪ Kepala Sub Bagian	31	34,1
	▪ Kepala Badan	35	38,5
	▪ Kepala Seksi	14	15,4
	Jumlah Responden :	91	100
Umur Responden	▪ < 30 Tahun	2	2,2
	▪ 31-35 Tahun	5	5,5
	▪ 36-40 Tahun	13	14,3
	▪ 41-45 Tahun	16	17,6
	▪ 46-50 Tahun	18	19,8
	▪ > 50 Tahun	37	40,7
	Jumlah Responden :	91	100
Jenis Kelamin	▪ Pria	46	50,5
	▪ Wanita	45	49,5
	Jumlah Responden :	91	100
Pendidikan	▪ D3	29	31,9
	▪ S1	42	46,2
	▪ S2	20	22,0
	Jumlah Responden :	91	100

Keterangan	Deskripsi	Frekuensi	Persen
Masa Kerja	▪ 10 Tahun	6	6,6
	▪ 11 Tahun	1	1,1
	▪ 12 Tahun	2	2,2
	▪ 13 Tahun	1	1,1
	▪ 14 Tahun	3	3,3
	▪ 15 Tahun	7	7,7
	▪ 17 Tahun	1	1,1
	▪ 18 Tahun	6	6,6
	▪ 19 Tahun	5	5,5
	▪ 20 Tahun	7	7,7
	▪ 21 Tahun	4	4,4
	▪ 22 Tahun	13	14,3
	▪ 23 Tahun	3	3,3
	▪ 24 Tahun	7	7,7
	▪ 25 Tahun	10	11,0
	▪ 26 Tahun	2	2,2
	▪ 27 Tahun	4	4,4
	▪ 28 Tahun	1	1,1
	▪ 29 Tahun	4	4,4
	▪ 30 Tahun	2	2,2
▪ 34 Tahun	1	1,1	
▪ 38 Tahun	1	1,1	
	Jumlah Responden :	91	100

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat dari 91 responden yang diteliti, terdiri dari 12,1 % atau 11 responden menduduki jabatan sebagai Sekretaris, 34,1 % atau 31 responden menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian, 38,5 % atau 35 responden menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang, dan 15,4 % atau 14 responden menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi.

Umur responden terlihat dari 91 responden yang diteliti, terdiri dari 2,2 % atau 2 responden berusia < 30 tahun, 5,5 % atau 5 responden berusia 30 s/d 35 tahun , 14,3 % atau 13 responden berusia 36 s/d 40 tahun, 17,6 % atau 16 responden berusia 41 s/d 45 tahun, 19,8 % atau 18 responden berusia 46 s/d 50 tahun dan 40,7 % atau 37 responden berusia > 50 tahun. Selain itu, dapat disimpulkan jika responden terbanyak berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 46 responden atau 50,5 % dan jumlah responden wanita sebanyak 45 atau 19,5 %.

Pendidikan responden terlihat dari 91 responden terdiri dari 29 atau 31,9 % responden berpendidikan D3, sebanyak 42 atau 46,2 % responden berpendidikan S1, dan sebanyak 20 atau 22,0 % responden berpendidikan S2. Masa bekerja responden di Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak merupakan pejabat yang memiliki masa bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 22 tahun.

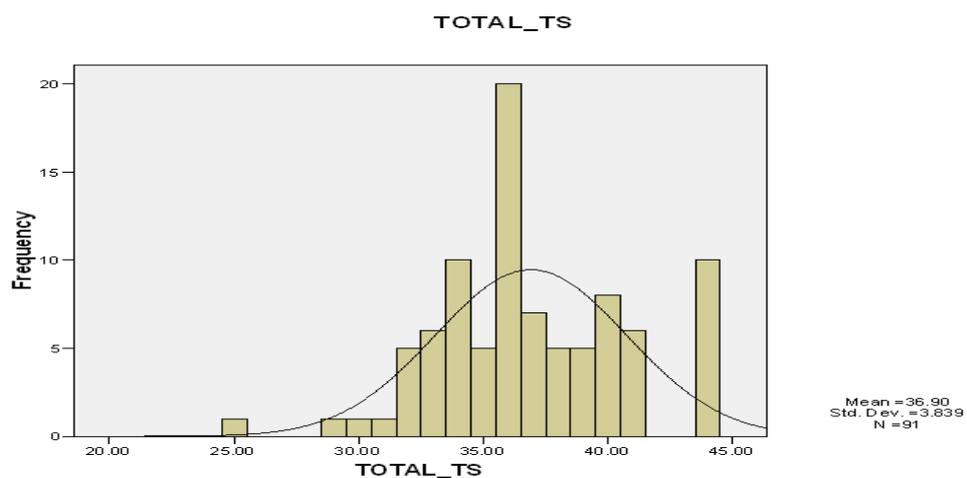
## 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.4 :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	Teoritis		Aktual	
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
Transparansi	5-45	25	25-45	36,90
Akuntabilitas	5-45	25	30-45	37,35
Aturan Hukum	5-45	25	27-45	36,84
Ekonomis	5-45	25	29-45	36,59
Efisiensi	5-45	25	29-45	37,57
Efektivitas	5-45	25	31-45	37,43

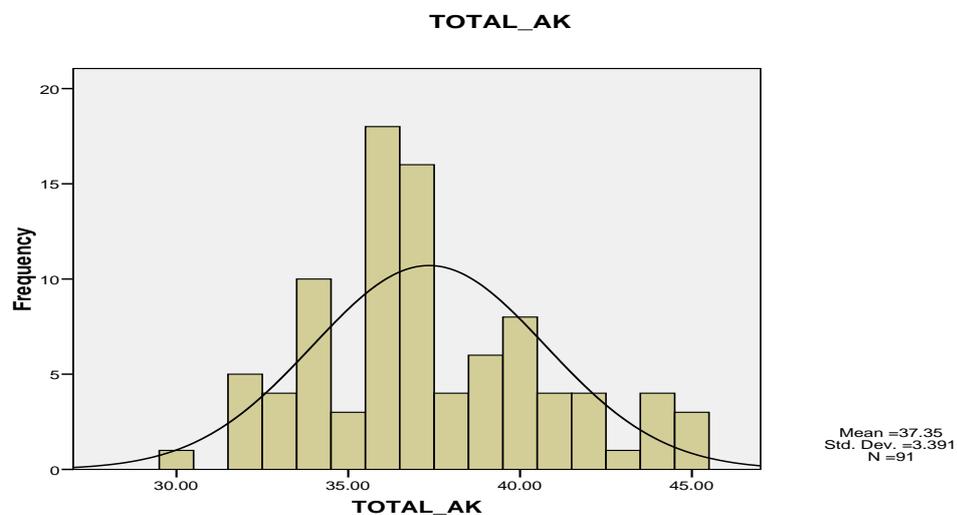
Sumber : Output SPSS V.15



**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Variabel Transparansi**

Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut :

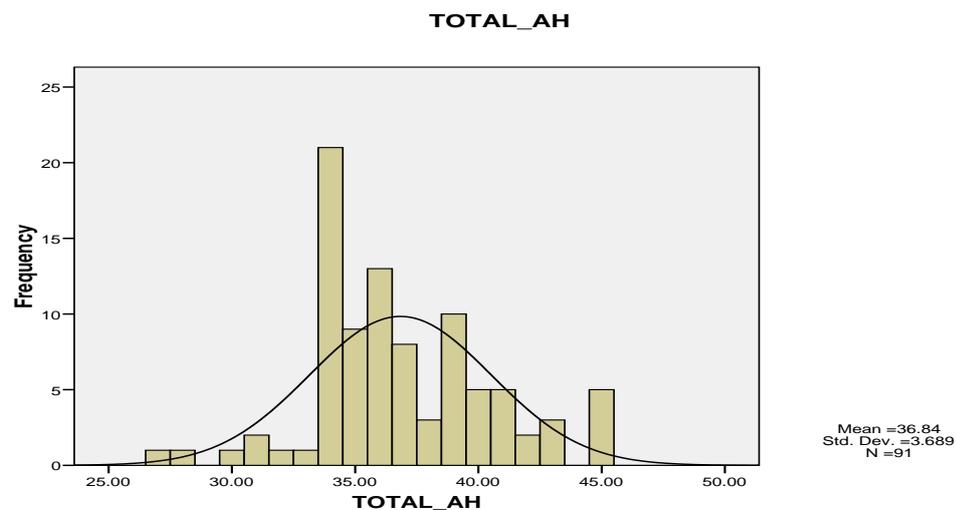
Hasil uji statistik deskriptif pada variabel transparansi sesuai dengan tabel 4.4 dan gambar 4.1 menunjukkan bahwa transparansi memiliki kisaran teoritis nilai jawaban responden antara 5-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 25. Berdasarkan aktual jawaban responden diperoleh kisaran nilai jawaban antara 25-44 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 36,90. Hasil tersebut menunjukkan jika  $\text{mean aktual} > \text{mean teoritis}$ . Hal tersebut membuktikan bahwa rata-rata transparansi yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen baik.



**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Statistik Variabel Akuntabilitas**

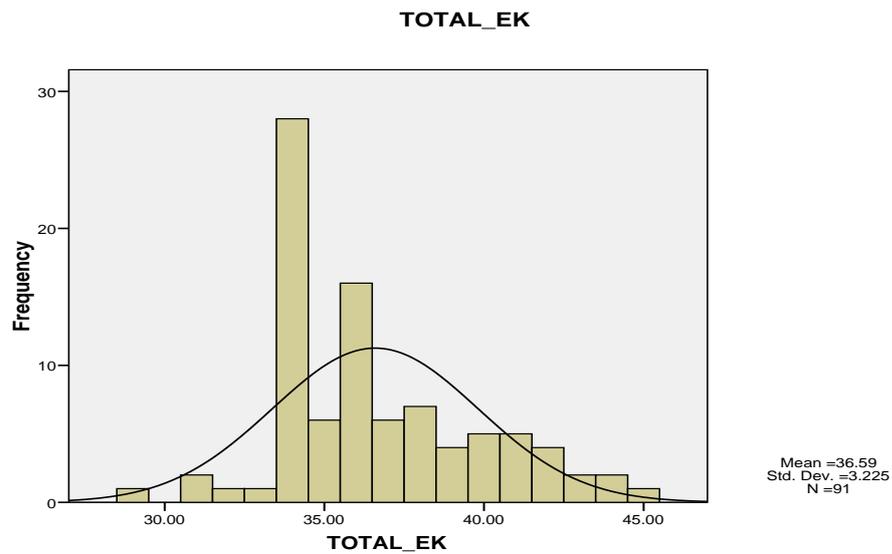
Hasil uji statistik deskriptif pada variabel akuntabilitas sesuai dengan tabel 4.4 dan gambar 4.2 menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki kisaran teoritis nilai jawaban responden antara 5-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 25. Berdasarkan aktual jawaban responden diperoleh kisaran nilai jawaban antara

30-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 37,35. Hasil tersebut menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis. Hal tersebut membuktikan bahwa rata-rata akuntabilitas yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen baik.



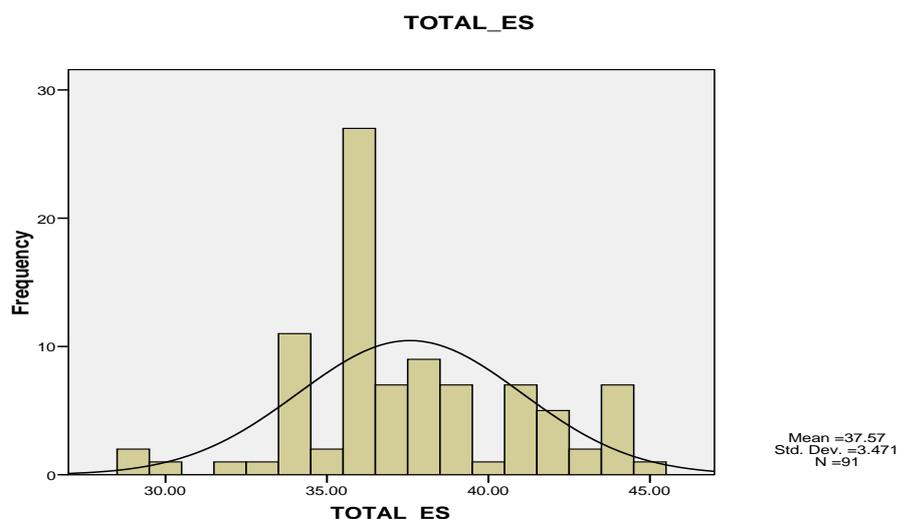
**Gambar 4.3**  
**Hasil Uji Statistik Variabel Aturan Hukum**

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel aturan hukum sesuai dengan tabel 4.4 dan gambar 4.3 menunjukkan bahwa aturan hukum memiliki kisaran teoritis nilai jawaban responden antara 5-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 25. Berdasarkan aktual jawaban responden diperoleh kisaran nilai jawaban antara 27-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 36,84. Hasil tersebut menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis. Hal tersebut membuktikan bahwa rata-rata aturan hukum yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen baik.



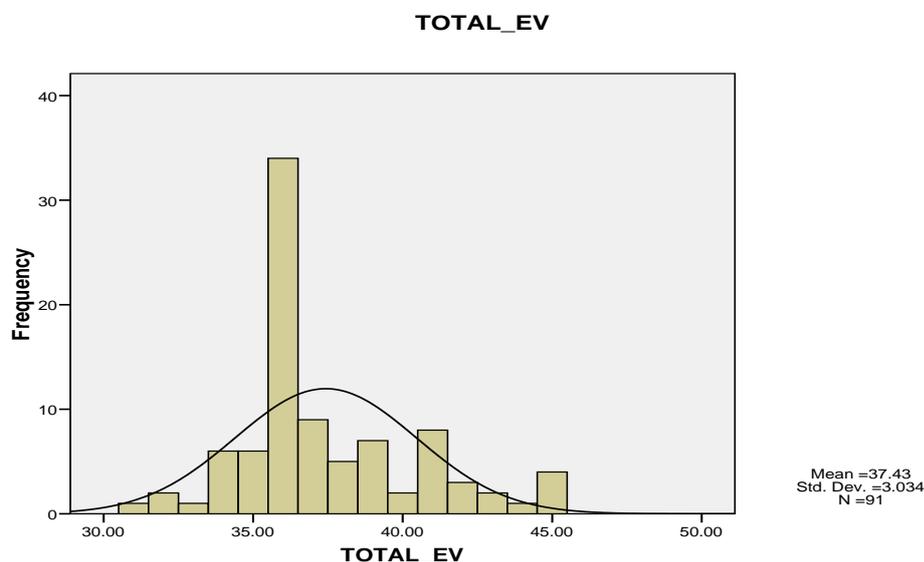
**Gambar 4.4**  
**Hasil Uji Statistik Variabel Ekonomis**

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel ekonomis sesuai dengan tabel 4.4 dan gambar 4.4 menunjukkan bahwa ekonomis memiliki kisaran teoritis nilai jawaban responden antara 5-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 25. Berdasarkan aktual jawaban responden diperoleh kisaran nilai jawaban antara 29-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 36,59. Hasil tersebut menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis. Hal tersebut membuktikan bahwa rata-rata ekonomis yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen baik.



**Gambar 4.5**  
**Hasil Uji Statistik Variabel Efisiensi**

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel efisiensi sesuai dengan tabel 4.4 dan gambar 4.5 menunjukkan bahwa efisiensi memiliki kisaran teoritis nilai jawaban responden antara 5-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 25. Berdasarkan aktual jawaban responden diperoleh kisaran nilai jawaban antara 29-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 37,57. Hasil tersebut menunjukkan jika  $\text{mean aktual} > \text{mean teoritis}$ . Hal tersebut membuktikan bahwa rata-rata efisiensi yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen baik.



**Gambar 4.6**  
**Hasil Uji Statistik Variabel Efektivitas**

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel efektivitas sesuai dengan tabel 4.4 menunjukkan bahwa efektivitas memiliki kisaran teoritis nilai jawaban responden antara 5-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 25. Berdasarkan aktual jawaban responden diperoleh kisaran nilai jawaban antara 31-45 dengan *mean* (rata-rata) sebesar 37,43. Hasil tersebut menunjukkan jika  $\text{mean aktual} > \text{mean teoritis}$ . Hal tersebut membuktikan bahwa rata-rata efektivitas yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen baik.

### 3. Uji Validitas

Berikut adalah hasil dari uji validitas dari beberapa pertanyaan mengenai variabel independen dan dependen yaitu :

**Tabel 4.5**  
**Uji Validitas Transparansi**

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Transparansi 1	0,693	Valid
Transparansi 2	0,696	Valid
Transparansi 3	0,744	Valid
Transparansi 4	0,820	Valid
Transparansi 5	0,640	Valid
Transparansi 6	0,713	Valid
Transparansi 7	0,705	Valid
Transparansi 8	0,705	Valid
Transparansi 9	0,399	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui jika faktor loading pada masing-masing variabel transparansi semua nilainya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel transparansi dapat dikatakan valid.

**Tabel 4.6**  
**Uji Validitas Akuntabilitas**

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Akuntabilitas 1	0,389	Valid
Akuntabilitas 2	0,477	Valid
Akuntabilitas 3	0,620	Valid
Akuntabilitas 4	0,649	Valid
Akuntabilitas 5	0,630	Valid
Akuntabilitas 6	0,398	Valid
Akuntabilitas 7	0,601	Valid
Akuntabilitas 8	0,660	Valid
Akuntabilitas 9	0,458	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui jika faktor loading pada masing-masing variabel akuntabilitas semua nilainya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel akuntabilitas dapat dikatakan valid.

**Tabel 4.7**  
**Uji Validitas Aturan Hukum**

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Aturan Hukum 1	0,669	Valid
Aturan Hukum 2	0,755	Valid
Aturan Hukum 3	0,713	Valid
Aturan Hukum 4	0,374	Valid
Aturan Hukum 5	0,473	Valid
Aturan Hukum 6	0,700	Valid
Aturan Hukum 7	0,719	Valid
Aturan Hukum 8	0,768	Valid
Aturan Hukum 9	0,667	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui jika faktor loading pada masing-masing variabel aturan hukum semua nilainya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel aturan hukum dapat dikatakan valid.

**Tabel 4.8**  
**Uji Validitas Ekonomis**

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Ekonomis 1	0,726	Valid
Ekonomis 2	0,463	Valid
Ekonomis 3	0,765	Valid
Ekonomis 4	0,696	Valid
Ekonomis 5	0,673	Valid
Ekonomis 6	0,713	Valid
Ekonomis 7	0,399	Valid
Ekonomis 8	0,705	Valid
Ekonomis 9	0,695	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui jika faktor loading pada masing-masing variabel ekonomis semua nilainya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel ekonomis dapat dikatakan valid.

**Tabel 4.9**  
**Uji Validitas Efisiensi**

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Efisiensi 1	0,678	Valid
Efisiensi 2	0,763	Valid
Efisiensi 3	0,802	Valid
Efisiensi 4	0,658	Valid
Efisiensi 5	0,762	Valid
Efisiensi 6	0,347	Valid
Efisiensi 7	0,607	Valid
Efisiensi 8	0,691	Valid
Efisiensi 9	0,731	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui jika faktor loading pada masing-masing variabel efisiensi semua nilainya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel efisiensi dapat dikatakan valid.

**Tabel 4.10**  
**Uji Validitas Efektivitas**

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Efektivitas 1	0,728	Valid
Efektivitas 2	0,609	Valid
Efektivitas 3	0,667	Valid
Efektivitas 4	0,687	Valid
Efektivitas 5	0,658	Valid
Efektivitas 6	0,375	Valid
Efektivitas 7	0,336	Valid
Efektivitas 8	0,773	Valid
Efektivitas 9	0,725	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui jika faktor loading pada masing-masing variabel efektivitas semua nilainya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel efektivitas dapat dikatakan valid.

#### 4. Uji Reliabilitas

Berikut adalah hasil dari uji validitas dari beberapa pertanyaan mengenai variabel independen dan dependen yang dapat dilihat pada tabel 4.11 :

**Tabel 4.11**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria
Transparansi	0,819	Reliabel
Akuntabilitas	0,669	Reliabel
Aturan Hukum	0,742	Reliabel
Ekonomis	0,735	Reliabel
Efisiensi	0,776	Reliabel
Efektivitas	0,695	Reliabel

Sumber : Output SPSS V.15

Dari tabel 4.11 terlihat bahwa masing-masing variabel yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, aturan hukum, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas masing-masing memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel ini dikatakan reliabel.

#### 5. Uji Asumsi Klasik

Adapun hasil dari asumsi klasik yang telah digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian terhadap kenormalan dari sebuah data. Sebuah data dapat dikatakan normal jika memiliki nilai uji *kolomogorov-smirnov* > 0,05. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas :

### 1. Uji Normalitas Variabel Dependen Ekonomis ( $Y_1$ )

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Normalitas Ekonomis**

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	<b>Keterangan</b>
0,257	Normal

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji normalitas dapat diketahui jika nilai signifikansi  $0,257 > \alpha 0,05$  yang artinya hasil dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal.

### 2. Uji Normalitas Variabel Dependen Efisiensi ( $Y_2$ )

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Normalitas Efisiensi**

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	<b>Keterangan</b>
0,642	Normal

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji normalitas dapat diketahui jika nilai signifikansi  $0,642 > \alpha 0,05$  yang artinya hasil dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal.

### 3. Uji Normalitas Variabel Dependen Efektivitas ( $Y_3$ )

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Normalitas Efektivitas**

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	<b>Keterangan</b>
0,256	Normal

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji normalitas dapat diketahui jika nilai signifikansi  $0,256 > \alpha 0,05$  yang artinya hasil dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal.

## b. Uji Multikolinearitas

Berikut merupakan hasil dari uji multikolinearitas :

### 1. Uji Multikolinearitas Variabel Dependen Ekonomis ( $Y_1$ )

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Multikolinearitas Ekonomis**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,536	1,864	Bebas Multikolinearitas
Transparansi	0,444	2,254	Bebas Multikolinearitas
Aturan Hukum	0,594	1,682	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* secara keseluruhan  $< 10$ . Hal ini menunjukkan jika masing-masing variabel independen dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

### 2. Uji Multikolinearitas Variabel Dependen Efisiensi ( $Y_2$ )

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Multikolinearitas Efisiensi**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,536	1,864	Bebas Multikolinearitas
Transparansi	0,444	2,254	Bebas Multikolinearitas
Aturan Hukum	0,594	1,682	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai

*Varian Inflation Factor (VIF)* secara keseluruhan  $< 10$ . Hal ini menunjukkan jika masing-masing variabel independen dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

### 3. Uji Multikolinearitas Variabel Dependen Efektivitas ( $Y_3$ )

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Multikolinearitas Efektivitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,536	1,864	Bebas Multikolinearitas
Transparansi	0,444	2,254	Bebas Multikolinearitas
Aturan Hukum	0,594	1,682	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* secara keseluruhan  $< 10$ . Hal ini menunjukkan jika masing-masing variabel independen dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas :

##### 1. Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen Ekonomis ( $Y_1$ )

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Ekonomis**

<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Kesimpulan</b>
Akuntabilitas	0,259	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Transparansi	0,110	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Aturan Hukum	0,166	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel secara keseluruhan  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan jika data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2. Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen Efisiensi ( $Y_2$ )

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Efisiensi**

<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Kesimpulan</b>
Akuntabilitas	.462	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Transparansi	.470	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Aturan Hukum	.823	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel secara keseluruhan  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan jika data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen Efektivitas ( $Y_3$ )

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Efektivitas**

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Akuntabilitas	.281	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Transparansi	.270	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Aturan Hukum	.527	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel secara keseluruhan  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan jika data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## B. Uji Hipotesis

### 1. Uji Signifikansi Simultan (Uji- $F$ )

#### a. Uji Signifikansi Simultan (Uji- $F$ ) Variabel Dependen Ekonomis ( $Y_1$ )

Berikut merupakan hasil uji- $F$  model regresi pertama yaitu :

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji- $F$  Ekonomis**

ANOVA <sup>b</sup>	
Sig.	.000(a)

Sumber : Output *SPSS V.15*

Hasil tabel 4.21 diatas dapat dilihat jika model persamaan ini menunjukkan nilai signifikansi  $F$   $0,000 < \alpha 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel ekonomis.

**b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) Variabel Dependen Efisiensi ( $Y_2$ )**

Berikut merupakan hasil uji-F model regresi kedua yaitu :

**Tabel 4.22**  
**Hasil Uji-F Efisiensi**

ANOVA <sup>b</sup>	
Sig.	.000(a)

Sumber : Output *SPSS V.15*

Hasil tabel 4.22 diatas dapat dilihat jika model persamaan ini menunjukkan nilai signifikansi  $F 0,000 < \alpha 0,05$  , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel efisiensi.

**c. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) Variabel Dependen Efektivitas ( $Y_3$ )**

Berikut merupakan hasil uji-F model regresi ketiga yaitu :

**Tabel 4.23**  
**Hasil Uji-F Efektivitas**

ANOVA <sup>b</sup>	
Sig.	.000(a)

Sumber : Output *SPSS V.15*

Hasil tabel 4.23 diatas dapat dilihat jika model persamaan ini menunjukkan nilai signifikansi  $F 0,000 < \alpha 0,05$  , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel efektivitas.

## 2. Uji Signifikansi Parsial (Uji $t$ )

### a. Uji Signifikansi Parsial (Uji $t$ ) Variabel Dependen Ekonomis ( $Y_1$ )

Berikut merupakan hasil uji  $t$  dari model persamaan pertama, yaitu :

**Tabel 4.24**  
**Hasil Uji- $t$  Ekonomis**

Variabel	Unstandardized Coefficients	Sig.
	B	
(Constant)	6,766	0,000
Akuntabilitas	0,095	0,234
Transparansi	0,214	0,007
Aturan Hukum	0,499	0,000

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan persamaan regresi adalah

$$Y_1 = 6,766 + 0,214 X_1 + 0,095 X_2 + 0,499 X_3 + e.$$

Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

#### 1. Uji Hipotesis 1 (H1)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada variabel transparansi yaitu  $0,007 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,214 dengan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan ekonomis kinerja SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

#### 2. Uji Hipotesis 2 (H2)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas yaitu  $0,234 > \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,095 dengan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap penerapan

ekonomis kinerja SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak.

### 3. Uji Hipotesis 3 (H3)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada variabel aturan hukum yaitu  $0,000 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,499 dengan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan ekonomis kinerja SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima.

#### b. Uji Signifikansi Parsial (Uji *t*) Variabel Dependen Efisiensi ( $Y_2$ )

Berikut merupakan hasil uji *t* dari model persamaan kedua, yaitu :

**Tabel 4.25**  
**Hasil Uji-*t* Efisiensi**

	Unstandardized Coefficients	Sig.
	B	
(Constant)	10,122	0,003
Akuntabilitas	0,135	0,219
Transparansi	0,267	0,014
Aturan Hukum	0,341	0,001

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan persamaan regresi adalah :

$$Y_2 = 10,122 + 0,267 X_1 + 0,135 X_2 + 0,341 X_3 + e.$$

Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

### 4. Uji Hipotesis 4 (H4)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada variabel transparansi yaitu  $0,014 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi

sebesar 0,267 dengan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan efisiensi kinerja SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima.

#### **5. Uji Hipotesis 5 (H5)**

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas yaitu  $0,219 > \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,135 dengan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap penerapan efisiensi kinerja SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) ditolak.

#### **6. Uji Hipotesis 6 (H6)**

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada variabel aturan hukum yaitu  $0,001 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,341 dengan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan efisiensi kinerja SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keenam (H6) diterima.

#### **c. Uji Signifikansi Parsial (Uji $t$ ) Variabel Dependen Efektivitas ( $Y_3$ )**

Berikut merupakan hasil uji  $t$  dari model persamaan ketiga, yaitu :

**Tabel 4.26**  
**Hasil Uji-t Efektivitas**

	Unstandardized Coefficients	Sig.
	B	
(Constant)	11,987	0,000
Akuntabilitas	0,170	0,067
Transparansi	0,240	0,008
Aturan Hukum	0,278	0,001

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan persamaan regresi adalah :

$$Y_3 = 11,987 + 0,240 X_1 + 0,170 X_2 + 0,278 X_3 + e.$$

Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

#### 7. Uji Hipotesis 7 (H7)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada variabel transparansi yaitu  $0,008 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,240 dengan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan efektivitas kinerja SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh (H7) diterima.

#### 8. Uji Hipotesis 8 (H8)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas yaitu  $0,067 > \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,170 dengan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap penerapan efektivitas kinerja SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan (H8) ditolak.

### 9. Uji Hipotesis 9 (H9)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada variabel aturan hukum yaitu  $0,001 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,278 dengan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan efektivitas kinerja SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kesembilan (H9) diterima.

### 3. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

#### a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) Variabel Dependen Ekonomis (Y<sub>1</sub>)

Berikut merupakan hasil uji *Adjusted R<sup>2</sup>* model persamaan pertama, yaitu :

**Tabel 4.27**  
**Hasil Uji *Adjusted R<sup>2</sup>* Ekonomis**

Model Summary <sup>b</sup>	
Adjusted R Square	.663

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan hasil dari tabel 4.27 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,663. Hal tersebut menunjukkan jika 66,3% variasi dari variabel ekonomis dapat dijelaskan oleh variabel transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum. Sisanya 33,7% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat didalam penelitian ini.

#### b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) Variabel Dependen Efisiensi (Y<sub>2</sub>)

Berikut merupakan hasil uji *Adjusted R<sup>2</sup>* model persamaan kedua, yaitu :

**Tabel 4.28**  
**Hasil Uji *Adjusted R<sup>2</sup>* Efisiensi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>	
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0,452</b>

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan hasil dari tabel 4.28 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,452. Hal tersebut menunjukkan jika 45,2% variasi dari variabel efisiensi dapat dijelaskan oleh variabel transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum. Sisanya 54,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat didalam penelitian ini.

**c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) Variabel Dependen Efektivitas ( $Y_3$ )**

Berikut merupakan hasil uji *Adjusted R<sup>2</sup>* model persamaan ketiga, yaitu :

**Tabel 4.29**  
**Hasil Uji *Adjusted R<sup>2</sup>* Efektivitas**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>	
<b>Adjusted R Square</b>	<b>0,452</b>

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan hasil dari tabel 4.29 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,497. Hal tersebut menunjukkan jika 49,7% variasi dari variabel efektivitas dapat dijelaskan oleh variabel transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum. Sisanya 50,3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat didalam penelitian ini.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Transparansi terhadap Ekonomis SKPD

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel transparansi didapatkan nilai signifikansi pada variabel transparansi yaitu  $0,007 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,214, hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomis SKPD di Kabupaten Kebumen. Semakin baik penerapan transparansi, maka semakin meningkat pula prinsip ekonomis yang merupakan salah satu prinsip dari *Value for Money Method* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen, dengan demikian  $H_1$  diterima. Hal tersebut terjadi karena pemberian informasi kepada publik sudah baik, penggunaan website resmi pemerintah sudah baik, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dilakukan dengan baik, kemudahan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran sudah cukup baik, laporan pertanggungjawaban tahunan sudah diterapkan dengan cukup baik pula, transparansi anggaran dapat menampung usulan juga sudah diterapkan dengan baik, pengumuman anggaran bisa diperoleh dalam setiap waktu sudah dilakukan dengan cukup baik namun masih perlu adanya peningkatan, pengumuman anggaran kepada masyarakat sudah baik, dan dokumen publik tentang anggaran mudah untuk diakses dan bersifat terbuka sudah baik.

Mendasari informasi diatas, mengenai hasil dari jawaban responden pada kuesioner tentang prinsip transparansi, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip transparansi pada SKPD di Kabupaten Kebumen

sudah dilakukan dengan baik dan tegas, sehingga penerapan transparansi tersebut memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap peningkatan ekonomis pada SKPD di Kabupaten Kebumen.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015), Ljungholm (2015), Setiyaningrum (2016), Fajarningtyas, Muslimin, & Kahar (2016) dan Intihanah dan Muthia (2017) bahwa penerapan prinsip transparansi yang merupakan prinsip dari *Good Government Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip ekonomis.

## **2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Ekonomis SKPD**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel transparansi didapatkan nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas yaitu  $0,234 > \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,095. Artinya bahwa penerapan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap ekonomis yang merupakan prinsip dari kinerja *Value for Money* pada SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian  $H_2$  ditolak. Hal tersebut terjadi karena tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur masyarakat belum dilakukan dengan baik, akuntabilitas kejujuran digunakan badan dalam melakukan penyusunan anggaran belum dilakukan dengan cukup baik, anggaran disajikan secara tepat, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat belum terlalu dilakukan dengan baik, kepentingan stakeholder menjadi perhatian utama dalam pengelolaan anggaran belum terlalu dilakukan dengan baik, penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan

yang berlaku belum dilakukan dengan baik, penerapan anggaran merupakan dokumen yang tidak bersifat rahasia juga belum diterapkan dengan cukup baik, indikator hasil kinerja yang dicapai akan digunakan untuk mengevaluasi anggaran sudah cukup baik, dalam mengevaluasi anggaran dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi dengan sesungguhnya sudah cukup baik, dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran harus diawasi secara terus menerus belum cukup baik.

Berdasarkan informasi diatas mengenai hasil dari jawaban responden pada kuesioner tentang prinsip akuntabilitas, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada SKPD di Kabupaten Kebumen belum dilakukan dengan cukup baik, sehingga penerapan akuntabilitas tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonomis SKPD di Kabupaten Kebumen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestiawan, dan Jatmiko (2015), Jitmau, Kalangi, & Lambey (2016) bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang merupakan prinsip dari *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip ekonomis. Dan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah pada DPPKAD Kabupaten Grobogan.

### 3. Pengaruh Aturan Hukum terhadap Ekonomis SKPD

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel aturan hukum, didapatkan nilai signifikansi pada variabel aturan hukum yaitu  $0,000 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,499. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan hukum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ekonomis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen. Artinya semakin baik dan tegas penerapan aturan hukum maka semakin meningkat pula kinerja pemerintah daerah sesuai dengan prinsip ekonomis yang merupakan salah satu prinsip *Value for Money*, dengan demikian  $H_3$  diterima. Hal tersebut terjadi karena adanya fungsi dalam organisasi yang menelaah tingkat kepatuhan pemerintah terhadap peraturan sudah dilakukan dengan baik, adanya jaminan pemberian teguran kepada setiap SKPD apabila terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik, melakukan penindaktegasan kepada SKPD berupa pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sudah dilakukan dengan cukup baik, adanya upaya untuk melakukan penyalahgunaan sudah dapat dicegah dengan cukup baik, penyamarataan pemberian sanksi belum terlalu baik karena para pegawai mengharapkan adanya perbedaan pemberian sanksi pada masing-masing tingkatan jabatan, adanya fungsi dalam organisasi yang memantau kepatuhan pemerintah terhadap peraturan yang berlaku sudah baik, adanya penindaktegasan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sudah baik, dan adanya hak stakeholders untuk dilindungi sesuai dengan hukum sudah baik.

Berdasarkan informasi diatas mengenai hasil dari jawaban responden pada kuesioner tentang prinsip aturan hukum, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip aturan hukum pada SKPD di Kabupaten Kebumen sudah dilakukan dengan baik dan tegas, sehingga penerapan aturan hukum tersebut berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap peningkatan ekonomis SKPD di Kabupaten Kebumen.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016), Akhamaddhian (2016), Partolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) dan Intihanah dan Muthia (2017) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip aturan hukum yang merupakan prinsip *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dan kinerja pemerintah daerah berkonsep *Value for Money*.

#### **4. Pengaruh Transparansi terhadap Efisiensi SKPD**

Hasil pengujian hipotesis dari variabel transparansi didapatkan nilai signifikansi pada variabel transparansi yaitu  $0,014 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,267. Artinya bahwa semakin baik penerapan prinsip transparansi berpengaruh terhadap efisiensi yang merupakan prinsip dari *Value for Money Method* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, dengan demikian  $H_4$  diterima. Hal tersebut terjadi karena pemberian informasi kepada publik sudah baik, penggunaan website resmi pemerintah sudah baik, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dilakukan dengan baik, kemudahan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran sudah cukup baik, laporan pertanggungjawaban tahunan

sudah diterapkan dengan cukup baik pula, transparansi anggaran dapat menampung usulan juga sudah diterapkan dengan baik, pengumuman anggaran bisa diperoleh dalam setiap waktu sudah dilakukan dengan cukup baik namun masih perlu adanya peningkatan, pengumuman anggaran kepada masyarakat sudah baik, dan dokumen publik tentang anggaran mudah untuk diakses dan bersifat terbuka sudah baik.

Berdasarkan informasi diatas mengenai hasil dari jawaban responden pada kuesioner tentang prinsip transparansi, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip transparansi pada SKPD di Kabupaten Kebumen sudah dilakukan dengan baik dan tegas, sehingga penerapan transparansi tersebut berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap peningkatan efisiensi SKPD di Kabupaten Kebumen.

Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Manuhara (2015), Ljungholm (2015), Pratolo, Jatmiko, dan Ardhi (2015) dan Claraini (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance* yang salah satunya terdapat prinsip transparansi terhadap kinerja daripada pemerintah daerah.

## **5. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efisiensi SKPD**

Hasil pengujian hipotesis dari variabel akuntabilitas didapatkan nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas yaitu  $0,219 > \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,135. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efisiensi pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Kebumen, dengan demikian H<sub>5</sub> ditolak. Hal tersebut terjadi karena tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur masyarakat belum dilakukan dengan baik, akuntabilitas kejujuran digunakan badan dalam melakukan penyusunan anggaran belum dilakukan dengan cukup baik, anggaran disajikan secara tepat, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat belum terlalu dilakukan dengan baik, kepentingan stakeholder menjadi perhatian utama dalam pengelolaan anggaran belum terlalu dilakukan dengan baik, penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku belum dilakukan dengan baik, penerapan anggaran merupakan dokumen yang tidak bersifat rahasia juga belum diterapkan dengan cukup baik, indikator hasil kinerja yang dicapai akan digunakan untuk mengevaluasi anggaran sudah cukup baik, dalam mengevaluasi anggaran dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi dengan sesungguhnya sudah cukup baik, dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran harus diawasi secara terus menerus belum cukup baik.

Berdasarkan informasi diatas mengenai hasil dari jawaban responden yang berhubungan tentang prinsip akuntabilitas, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada SKPD di Kabupaten Kebumen belum dilakukan dengan cukup baik, sehingga penerapan akuntabilitas tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pada SKPD di Kabupaten Kebumen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestiawan, dan Jatmiko (2015), Jitmau, Kalangi, & Lambey (2016) bahwa

penerapan prinsip akuntabilitas yang merupakan prinsip dari *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip ekonomis. Dan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah pada DPPKAD Kabupaten Grobogan.

## **6. Pengaruh Aturan Hukum terhadap Efisiensi SKPD**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel aturan hukum didapatkan nilai signifikansi pada variabel aturan hukum yaitu  $0,001 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,341. Hal tersebut menunjukkan jika penerapan aturan hukum berpengaruh terhadap efisiensi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. Artinya semakin tegas dan baik pemerintah menerapkan aturan hukum, maka semakin meningkat pula efisiensi dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, dengan demikian  $H_6$  diterima. Hal tersebut terjadi karena adanya fungsi dalam organisasi yang menelaah tingkat kepatuhan pemerintah terhadap peraturan sudah dilakukan dengan baik, adanya jaminan pemberian teguran kepada setiap SKPD apabila terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik, melakukan penindaktegasan kepada SKPD berupa pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sudah dilakukan dengan cukup baik, adanya upaya untuk melakukan penyalahgunaan sudah dapat dicegah dengan cukup baik, penyamarataan pemberian sanksi belum terlalu baik karena para pegawai mengharapkan adanya perbedaan pemberian sanksi pada masing-masing tingkatan jabatan, adanya fungsi dalam organisasi yang

memantau kepatuhan pemerintah terhadap peraturan yang berlaku sudah baik, adanya penindaktegasan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sudah baik, dan adanya hak stakeholders untuk dilindungi sesuai dengan hukum sudah baik.

Berdasarkan informasi diatas mengenai hasil dari jawaban responden yang berhubungan tentang prinsip aturan hukum, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip aturan hukum pada SKPD di Kabupaten Kebumen sudah dilakukan dengan baik dan tegas, sehingga penerapan aturan hukum tersebut berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap peningkatan efisiensi SKPD di Kabupaten Kebumen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko, dan Ardhi (2015), Intihanah dan Muthia (2017), Akhmaddhian (2016), Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016), dan Syurgawi (2015) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan aturan hukum yang merupakan prinsip *Good Government Governance* terhadap kinerja berkonsep *Value for Money* maupun kinerja yang tidak berkonsep *Value for Money* daripada pemerintah daerah.

## **7. Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas SKPD**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel transparansi didapatkan nilai signifikansi pada variabel transparansi yaitu  $0,008 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,240. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara penerapan transparansi terhadap efektivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen. Artinya semakin baik

penerapan transparansi dilakukan, maka akan semakin meningkat pula efektivitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen, dengan demikian H<sub>7</sub> diterima. Hal tersebut terjadi karena pemberian informasi kepada publik sudah baik, penggunaan website resmi pemerintah sudah baik, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dilakukan dengan baik, kemudahan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran sudah cukup baik, laporan pertanggungjawaban tahunan sudah diterapkan dengan cukup baik pula, transparansi anggaran dapat menampung usulan juga sudah diterapkan dengan baik, pengumuman anggaran bisa diperoleh dalam setiap waktu sudah dilakukan dengan cukup baik namun masih perlu adanya peningkatan, pengumuman anggaran kepada masyarakat sudah baik, dan dokumen publik tentang anggaran mudah untuk diakses dan bersifat terbuka sudah baik.

Mendasari informasi diatas mengenai hasil dari jawaban responden yang berhubungan tentang prinsip transparansi, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip transparansi pada SKPD di Kabupaten Kebumen sudah dilakukan dengan baik dan tegas, sehingga penerapan transparansi tersebut memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap peningkatan efektivitas pada SKPD di Kabupaten Kebumen.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akhmadi (2014) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada SKPD Kabupaten Batang Hari. Selain itu Pratolo, Jatmiko, dan Ardhi (2015), Setiyaningrum

(2016), dan Intihanah & Muthia (2017) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara transparansi yang merupakan salah satu prinsip dari *Good Government Governance* terhadap kinerja baik yang berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip efektivitas maupun yang tidak, sehingga semakin baik penerapan transparansi maka semakin meningkat pula efektivitas.

#### **8. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas SKPD**

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel akuntabilitas terhadap efektivitas didapatkan nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas yaitu  $0,067 > \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,170. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap penerapan efektivitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, dengan demikian  $H_8$  ditolak. Hal tersebut terjadi karena tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur masyarakat belum dilakukan dengan baik, akuntabilitas kejujuran digunakan badan dalam melakukan penyusunan anggaran belum dilakukan dengan cukup baik, anggaran disajikan secara tepat, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat belum terlalu dilakukan dengan baik, kepentingan stakeholder menjadi perhatian utama dalam pengelolaan anggaran belum terlalu dilakukan dengan baik, penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku belum dilakukan dengan baik, penerapan anggaran merupakan dokumen yang tidak bersifat rahasia juga belum diterapkan dengan cukup baik, indikator hasil kinerja yang dicapai akan digunakan untuk mengevaluasi anggaran sudah cukup baik, dalam

mengevaluasi anggaran dilakukan dengan membandingkan antara target realisasi dengan sesungguhnya sudah cukup baik, dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran harus diawasi secara terus menerus belum cukup baik.

Berdasarkan informasi diatas mengenai hasil dari jawaban responden yang berhubungan tentang prinsip akuntabilitas, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada SKPD di Kabupaten Kebumen belum dilakukan dengan cukup baik, sehingga penerapan akuntabilitas tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas pada SKPD di Kabupaten Kebumen.

Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah pada DPPKAD Kabupaten Grobogan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Jitmau, Kalangi, & Lambey (2016) dan Lestiawan, dan Jatmiko (2015), bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang merupakan prinsip dari *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip ekonomis. Namun, hasil pengujian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2010), Ferry dkk (2015) dan Prayoga (2017) yang menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## 9. Pengaruh Aturan Hukum terhadap Efektivitas SKPD

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel aturan hukum terhadap efektivitas didapatkan nilai signifikansi pada variabel aturan hukum yaitu  $0,001 < \alpha 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,278.. Artinya semakin baik dan tegas penerapan aturan hukum maka semakin meningkat pula efektivitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, dengan demikian  $H_0$  diterima. Hal tersebut terjadi karena adanya fungsi dalam organisasi yang menelaah tingkat kepatuhan pemerintah terhadap peraturan sudah dilakukan dengan baik, adanya jaminan pemberian teguran kepada setiap SKPD apabila terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik, melakukan penindaktegasan kepada SKPD berupa pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sudah dilakukan dengan cukup baik, adanya upaya untuk melakukan penyalahgunaan sudah dapat dicegah dengan cukup baik, penyamarataan pemberian sanksi belum terlalu baik karena para pegawai mengharapkan adanya perbedaan pemberian sanksi pada masing-masing tingkatan jabatan, adanya fungsi dalam organisasi yang memantau kepatuhan pemerintah terhadap peraturan yang berlaku sudah baik, adanya penindaktegasan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sudah baik, dan adanya hak stakeholders untuk dilindungi sesuai dengan hukum sudah baik.

Berdasarkan informasi diatas mengenai hasil dari jawaban responden yang berhubungan tentang prinsip aturan hukum, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip aturan hukum pada SKPD di Kabupaten

Kebumen sudah dilakukan dengan baik dan tegas, sehingga penerapan aturan hukum tersebut berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap peningkatan efektivitas pada SKPD di Kabupaten Kebumen.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Syurgawi (2015), Muthia (2017) dan Akhamddian (2016) yang menyatakan bahwa penerapan aturan hukum berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fajarningtyas, Muslimin, & Kahar (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan *Good Government Governanve* yang salah satunya adalah aturan hukum terhadap kinerja berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip efektivitas.